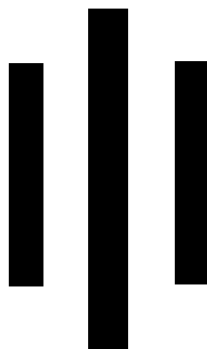




PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**LAPORAN PENYELENGGRAAN
PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2022**



**KOTABARU
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Assamu'alaikumWarrahmatullahiWabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, atasijin dan rahmatNYA sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2022 dapat disusun dengan baik. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2022 disusun dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dengan demikian LPPD Tahun 2022 ini merupakan informasi capaian pelaksanaan kinerja pembangunan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2022 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotabaru tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026.

Selanjutnya, kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu dan mendukung dalam proses penyusunan LPPD Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru, kami ucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi, semoga dapat bermanfaat dalam memberikan informasi terhadap Penyusunan LPPD Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2022.

Wassalamu'alaikumWarrahmatullahiWabarakatuh
Kotabaru, 20 Januari 2023

Kepala Dinas,

Ir. H. Hardhani, M.Si
Nip.19650401 199308 1001
Pembina Utama Muda IV/c

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BABI PENDAHULUAN

- 1.1. Dasar Hukum
 - 1.1.1. Dasar Hukum Penyusunan LPPD
 - 1.1.2. Dasar Hukum Pembentukan SKPD
- 1.2. Gambaran Umum
 - 1.2.1. Struktur Organisasi
 - 1.2.2. Tugas Pokok dan fungsi
 - 1.2.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat structural dan Fungsional
 - 1.2.4. Kondisi Sarana dan Prasarana

BABII CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

- 2.1. Capaian Pelaksanaan program dan kegiatan
- 2.2. Kebijakan Strategis yang dilaksanakan
- 2.3. Capaian Indikator Kinerja kunci keluaran (Output)
- 2.4. Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome)
- 2.5. Capaian Kinerja Kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan
- 2.6. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
- 2.7. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun anggaran Sebelumnya (*Lihat Keterangan pada Catatan)

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

- 3.1. Tugas Pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.
 - 3.1.1. Target Kinerja
 - 3.1.2. Realisasi
- 3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.2.1. Target Kinerja

3.2.2. Realisasi

3.3. Permasalahan dan kendala

3.4. Saran dan TindakLanjut

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Yang dilaksanakan

4.1.1. Jenispelayanan Dasar

4.1.2. Target pencapaian SPM

4.1.3. Realisasi

4.1.4. AlokasiAnggaran

4.1.5. DukumenPersonil

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan pembangunan agar mampu eksis, unggul, dan mampu memberikan kontribusi serta peran nyata dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah daerah maka instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Baru berpedoman pada peraturan yang berlaku dalam menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

1.1.1. Dasar Hukum Penyusunan LPPD

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar Akutansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas instansi pemerintah.

9. Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.
10. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/2004 tentang penetapan kinerja.
11. KepMenPAN No.135 Tahun 2004 tentang pedoman umum evaluasi akuntabilitas kinerja.
12. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan, organisasi dan tata kerja Kementrian Negara Republik Indonesia.
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2009 tentang organisasi dan tata kerja kementrian Negara perdayaan aparaturnegara dan reformasi birokrasi.
15. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan aparaturnegara dan reformasi birokrasi nomor 13 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2010.
16. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan LKIP.
17. Pepres No 29 Tahun 2014 tentang system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 tahun 2017 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 13);

21. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 30);

1.1.2. Dasar Hukum Pembentukan SKPD

Dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang mampu memberikan kontribusi serta peranannya dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kotabaru berdasarkan pada peraturan yang ada antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2019 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 4);
2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 138 tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan, organisasi tugas pokok dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab Kotabaru.

1.2 GAMBARAN UMUM

1.2.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2019 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 4); dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 138 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru.

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru terdiri Kepala Dinas, Sekretaris, 5 (lima) Bidang, 13 (tigabelas) seksi, 3 (tiga) Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Perencanaan ;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 3) Subbagian Keuangan ;
- c. Bidang Koperasi terdiri dari :
 - 1) Seksi Kelembagaan dan pengawasan Koperasi;
 - 2) Seksi Bina Usaha Koperasi ;
 - 3) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
- d. Bidang Usaha mikro terdiri dari :
 - 1) Seksi pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro ;
 - 2) Seksi Pengembangan Kewirausahaan ;
- e. Bidang Perindustrian terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan dan Inovasi Industri;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Industri ;
 - 3) Seksi Sistem Informasi dan fasilitas Industri ;
- f. Bidang Kemetereologian dan Pengawasan Perdagangan

- 1) Seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - 2) Seksi Pengawasan dan perlindungan Konsumen;
- g. Bidang Stabilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan
- 1) Seksi Pengelolaan sarana dan Prasarana Distribusi;
 - 2) Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan;
 - 3) Seksi Stabilitas barang pokok dan Penting;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru yang beralamat di Jalan Putri Ciptasari Komplek Pasar kemakmuran Kotabaru Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru. Pembentukan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2019 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 4); dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 138 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut ;

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan dan penetapan kebijakan teknis di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
 - c. penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang koperasi;
 - d. penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang usaha mikro;
 - e. penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang perindustrian;
 - f. Penyelenggaraan, Pengkoordinasian dan evaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang Kemetrollogian dan pengawasan perdagangan;
 - g. Penyelenggaraan, Pengkoordinasian dan evaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang stabilitasi dan sarana distribusi perdagangan;
 - h. penyelenggara pelaksana evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - i. penyelenggara pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
 - j. penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di UPTD; dan
 - k. penyelenggara pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Kesekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, menyediakan dan memeriksa tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan

yang meliputi pengkoordinasian penyusunan perencanaan program, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan umum dan kepegawaian.

2. Bidang Koperasi

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyediakan dan memeriksa tugas di bidang koperasi yang meliputi kelembagaan dan pengawasan koperasi, peningkatan kualitas SDM dan bina usaha koperasi.

a. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang koperasi dalam kelembagaan dan pengawasan Koperasi.

b. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang koperasi dalam peningkatan kualitas SDM Koperasi.

c. Seksi Bina Usaha Koperasi

Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Tugas Bidang Koperasi dalam Pembinaan dan Pengelolaan Bina Usaha Koperasi.

3. Bidang Usaha Mikro

Bidang usaha Mikro mempunyai tugas pokok merencanakan, menyediakan dan memeriksa tugas-tugas di bidang usaha mikro yang meliputi pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro dan pengembangan kewirausahaan.

a. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro

Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro dalam pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro.

b. Seksi PengembanganKewirausahaan

Seksi PengembanganKewirausahaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang usaha mikro dalam pengelolaan pengembangankewirausahaan.

4. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok merencanakan, menyedia dan memeriksa tugas di bidang perindustrian yang meliputi pembangunan dan pengembanganpembangunan industri, perizinan dan inovasi industri, dan sistem informasi industri.

a. Seksi Pemberdayaan dan Inovasi Industri

SeksiPemberdayaan dan InovasiIndustrimempunyaitugaspokokmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkanpelaksanaantugasbidangperindustriandalamPemberdayaan dan inovasiindustri.

b. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Industri

SeksiPerencanaan dan PengembanganIndustrimempunyaitugaspokokmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkanpelaksanaantugasbidangperindustriandalam pembangunan dan pengembanganindustri.

c. SeksiSistem Informasi dan FasilitasIndustri

SeksiSistemInformasi dan FasilitasIndustrimempunyaitugaspokokmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkanpelaksanaantugasbidangperindustriandalam sisteminformasi dan Fasilitasindustri.

5. Bidang Kemetrologian dan PengawasanPerdagangan

Bidang Kemetrollogian dan Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyedia dan memeriksa tugas-tugas di bidang kemetrollogian dan pengawasan perdagangan yang meliputi pelayanan tera dan tera ulang, pembinaan jabatan fungsional bidang kemetrollogian dan pengawasan perdagangan.

a. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Seksi PelayananTera dan Tera Ulang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang kemetrollogian dan pengawasan perdagangan dalam pelaksanaantera, dan tera ulangalatukur.

b. Seksi Pengawasan dan PerlindunganKonsumen

Seksi Pengawasan dan PerlindunganKonsumen mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang kemetrollogian dan pengawasan perdagangan dalam pelaksanaanpengawasan dan perlindungankonsumen.

6. Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan

Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyedia dan memeriksa tugas di bidang stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan yang meliputi pembangunan sarana distribusi perdagangan, pembinaan, pengelolaan sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting.

a. Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Distribusi

Seksi Peengelolaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan dalam pelaksanaanpembangunan sarana distribusi perdagangan.

b. Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan

Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan dalam pembinaanusahaperdagangan.

c. Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting

Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan dalam pelaksanaan stabilisasi barang pokok dan penting.

Kelompok Jabatan Fungsional

1.2.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 138 tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan, organisasi tugas pokok dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab Kotabaru memiliki sumber daya manusia (SDM) pada Tahun 2022 sebanyak 64 orang, dan didukung tenaga non PNS sebanyak 75 orang, sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 64 orang;
2. Tenaga Non PNS (TNP) sebanyak 75 orang terdiri dari ;
 - a. 45 Orang Tenaga Kebersihan
 - b. 30 Orang Tenaga Administrasi lainnya

Rincian pegawai PNS dan TNP dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai Struktural

NO	JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH (ORANG)	KET
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretaris	0	
	a. Subbagian Perencanaan	1	
	b. Subbagian Umum dan Kepegawaian	1	
	c. Sub Bagian Keuangan	-	
3	Bidang Koperasi	1	
	a. Seksi Kelembagaan dan pengawasan Koperasi;	-	
	b. Seksi Bina Usaha Koperasi ;	1	
	c. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	1	

4	Bidang Usahamikro		1	
	a.	Seksi pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro	1	
	b.	Seksi Pengembangan Kewirausahaan	1	
5	Bidang Perindustrian		1	
	a.	Seksi Pemberdayaan dan Inovasi Industri;	0	
	b.	Seksi Pembangunan dan Pengembangan Industri	1	
	c.	Seksi Sistem Informasi dan Fasilitas Industri	0	
6	Bidang Kemetriologian dan Pengawasan Perdagangan		1	
	a.	Seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	
	b..	Seksi Pengawasan dan perlindungan Konsumen	-	
7	Bidang Stabilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan		1	
	a.	Seksi Pengelolaan sarana dan Prasarana Distribusi	-	
	b.	Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan	1	
	c.	Seksi Stabilitas barang pokok dan Penting	1	
8	Kelompok Jabatan Fungsional			

b. Kualifikasi pendidikan

Tabel 1

Jumlah PNS dan Non PNS Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan menurut Golongan dan pendidikan Tahun 2022

No	Jumlah pegawai menurut						Keterangan		
	Golongan	Jumlah	%	Pendidikan	Jumlah	%	Jabatan	Jumlah	%
1	I	6 org		SD/SMP	6 org		Struktural	18 Org	
2	II	28 org		SMA	28 org		Fungsional khusus	4 org	
3	III	22 org		DIII	3 org		Fungsional	38 org	
4	IV	4 ORG		S1	17 org				
				S2	6 org				
				S3	0 org				
	Tenaga Non PNS								
1	TNP	65 org		SD/SMP	30 ORG		Petugas kebersihan pasar	45 org	
				SMA	26 org		Administrasi	20 org	
				S.1	9 org				

Tabel 2

SDM Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Pada Tahun 2022 Menurut Eselon/ Golongan.

NO	Jumlah pejabat menurut					
	Eselon	Jumlah	%	Golongan	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7
	II	1 org		Ia	0 org	
	III	3 org		I b	2 org	

	IV	13 org		I c	3 org	
	Non eselon	43 org		I d	1 org	
				II a	1 org	
				II b	9 org	
				II c	12 org	
				II d	6 0rg	
				III a	4 org	
				III b	3 0rg	
				III c	7 org	
				III d	8 org	
				IV a	3 0rg	
				IV b	0 org	
				IV c	1 org	
				IV d	0 0rg	

Tabel 3

Keadaan SDM Dinas Koperasi Perindustrian dan
PerdaganganKabupatenKotabaruPada Tahun
2022MenurutPenempatan/Penugasan.

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan	
			Diisi	Kosong
1	Kepala Dinas/Badan	1 Org	1	0
2	Sekretaris	1 org	1	0
3	KepalaBidang	5 org	4	1
4	Kasub Bag	3 org	2	1
5	Kapalaseksi	13 org	8	5

Adapun StrukturOrganisasiDinas Koperasi, Perindustrian dan
PerdaganganKab. Kotabarudapatdilihatdalam daftar lampiran

1.2.4. KONDISISARANA DAN PRASARANA

Sarana prasaranasangat berpengaruhlangsungpelaksanaantugaspokok dan
fungsimeliputiruangkerja, peralatankomputer,
telekomunikasidantransportasi. Kondisisaranaprasarana di Dinas
Koperasi,Perindustrian dan
PerdaganganKab.Kotabarusejauhini dirasatelahcukupmemadaiuntukmenunj
angkinerjawalaupunadabeberapasaranaprasarana yang
yangmasihkurangsertamengalamikerusakan.

Selainituseluruhkomputersudahberjaringan internet melaluiwifi dan

sudahmemilikialamat website serta email resmi. Berikutiniperkembangan Data Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, Perindustrian dan PerdaganganKotabarudapatdilihatdalam daftarsebagaiberikut.

Table. 1.2.4

Daftar inventaris Sarana dan prasarana

N0	Jenissarana dan prasarana	Keterangan
1	Mobil	baik
2	Sepeda motor	baik
3	Filling besi/metal	baik
4	Band kas	baik
5	Lemarikayu	baik
6	Papannamainstansi	baik
7	Papanpengumuman	baik
8	Papantulis	baik
9	Whiteboard	baik
10	Overhead proyektor	baik
11	Mejakayu	baik
12	Kursibesi/metal	baik
13	Kursikayu	baik
14	Mejarapat	baik
15	Mejatulis	baik
16	Kursirapat	baik
17	Kursiputar	baik
18	Kursibiasa	baik
19	Kursilipat	baik
20	Sofa	baik
21	Mebeulerlainnya	baik
22	Lemariarsip	baik
23	Alat pembersih lain-lain	baik
24	Lemari Es	baik
25	AC Unit	baik
26	KipasAngin	baik
27	Televisi	baik
28	Sound Sistem	baik
29	TiangBendera	baik
30	TanggaAlumunium	baik
31	Dispenser	baik
32	Alat RumahTangga Lain-lain	baik
33	Gordin/Vitras	baik
34	Notebook	baik
35	Personal Komputer Lain-lain	baik
36	Printer	baik

37	Scenner	rusak
38	MejaKerjaPejabatEselon II	baik
39	KursiPejabatEselon II	baik
40	KursiKerjaPegawai Non Struktural	baik
41	KursiKerjaPejabat Lain-lain	baik
42	LemariArsipUntukArsip Dinas	baik
43	Lemari&ArsipPejabat lain-lain	baik
44	Micropon/Wirelles Mic	baik
45	CCVT	rusak
46	Camera Electron	baik
47	Sound Sistem	baik
48	Facsilime	rusak
49	Bangunan Gedung Kantor Permanen	baik
50	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	baik
51	Gedung Pertokoan/ Pasar Permanen	baik
52	Gedung Pertokoan/Pasar Semi Permanen	baik
53	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain	baik
54	Bangunan Gedung FasilitasUmumLainnya	baik
55	Instalasi Air Bersih Lain-lain	baik
56	JaringanTelepon/internet	baik

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan kegiatan

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan untuk Tahun Anggaran 2022 mempunyai 13 (tigabelas) program, 22 (duapuluhdua) kegiatan dan 43 (empatpuluh tiga) sub kegiatan untuk program dan kegiatan tersebut terbagi menjadi dua urusan, yaitu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan. Untuk urusan wajib ada 1 (satu) program rutin, 3 (tiga) program di bidang koperasi, 2 (dua) program bidang Usaha mikro. Untuk urusan pilihan ada 4 (empat) program di bidang Stabilitas sarana dan prasarana distribusi perdagangan, 1 (satu) program di bidang Metrologi dan pengawasan Perdagangan, dan 3 (tiga) program di bidang Industri. Anggaran yang tersedia untuk Belanja Program dan kegiatan sebesar Rp. 20.658.790.862,- terrealisasi sebesar Rp. 16.433.677.984,- atau pencapaian 79,60 % dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Keg. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 229.085.000,- terrealisasi sebesar Rp. 224.810.058,- atau 98,13% digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan belanja rapat. Hasil yang dicapai/output kegiatan yaitu jumlah dokumen perencanaan sebanyak 3 dokselama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.1

Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah Tahun 2022

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	229.085.000,-	224.810.058.-
2	Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	3 duk	3 duk
3	Hasil	Dokumen perencanaan	100 %	98,13 %

2. Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 136.145.500,-
 terealisasi sebesar Rp. 135.679.000.- atau 99.66%
 digunakan untuk rapat koordinasi dan evaluasi kinerja Hasil yang
 dicapai / out come kegiatan yaitu jumlah evaluasi kinerja sebanyak 1 dok selama 12
 bulan dengan baik di lingkungan kantor Dinas.
 Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di
 bawah ini :

Tabel 2.1.2

Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Tahun 2022

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	136.145.500,-	135.679.000.-
2	Keluaran	Jumlah evaluasi kinerja	1 duk	1 duk
3	Hasil	Dok Evaluasi kinerja	100 %	99,66%

2. Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah

3. Sub Keg. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.939.008.692,-
 terealisasi sebesar Rp. 6.175.300.933.- atau 88,99%
 digunakan untuk Melakukan pembayaran gaji, tunjangan dan insentif .
 Hasil yang dicapai / out come kegiatan yaitu jumlah pembayaran gaji
 dan tunjangan pns sebanyak 26 kl selama 12 bulan.
 Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di
 bawah ini :

Tabel 2.1.3

Sub Keg. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Tahun 2022

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	6.939.008.692,-	6.175.300.933
2	Keluaran	jumlahpegawai yang dibayar	26 kl	26 kl
3	Hasil	Terbayarnya gaji pegawai dan tunjangan	100%	88,99 %

4. **Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksana tugas ASN.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.378.327.200,- terrealisasi sebesar Rp. 1.368.727.200,- atau 99,30% digunakan untuk Melakukan Membayar honorarium kegiatan dan tertib administrasi keuangan. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah pembayaran jasa administrasi keuangan sebanyak 12 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.4
Penyediaan Administrasi Pelaksana tugas ASN

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	1.378.327.200,-	1.368.727.200.-
2	Keluaran	jumlah pembayaran jasa administrasi keuangan	12 kl	12 kl
3	Hasil	Membayar honorarium kegiatan dan tertib administrasi keuangan	100 %	99,30

5. **Sub Keg. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 488.585.000,- terrealisasi sebesar Rp. 459.665.000,- atau 94,08% digunakan untuk Melakukan Membayar honorarium verifikasi keuangan. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah dokumen penatausahaan keuangan SKPD sebanyak 12 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.5
Penyediaan Administrasi Pelaksana tugas ASN

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	488.585.000,-	459.665.000.-
2	Keluaran	jumlah dokumen penatausahaan keuangan	12 kl	12 kl

		SKPD		
3	Hasil	Terbayar honorarium pengelola kegiatan dan verifikasi keuangan	100 %	94.08%

6. Sub Keg. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.500.000,- terrealisasi sebesar Rp. 3.500.000,- atau 100% digunakan untuk melakukan penyusunan laporan keuangan akhir tahun . Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dok selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.6

Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	3.500.000,-	3.500.000
2	Keluaran	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1 dok	1 dok
3	Hasil	Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun	100%	100%

7. Sub Keg. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 1.000.000,- atau 100% digunakan untuk menyusun dokumen analisis dan realisasi keuangan semesteran. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah dokumen laporan dan analisis prog realisasi anggaran sebanyak 1 duk selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.7

Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	1.000.000,-	1.000.000
2	Keluaran	jumlah pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja	1 duk	1 duk

3	Hasil	Kendaraan operasional angkutan sampah dapat dipungsikan/ dipergunakan kembali	100 %	100%
---	-------	---	-------	------

3. Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah

8. Sub Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 29.950.000,- terrealisasi sebesar Rp. 29.950.000,- Atau 100% digunakan untuk penyediaan komponen instalasi listrik dan penggantian lampu, penerangan blok-blok pasar serta lingkungan pasar. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor sebanyak 12 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.8
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	29.950.000,-	29.950.000,-
2	Keluaran	jumlah penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	12 kl	12 kl
3	Hasil	Kantor, blok toko/ kios pasar, selasar dan halaman terang - Pengawasan petugas tetap terjaga dengan baik	100 %	100%

9. Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 33.278.200,- terrealisasi sebesar Rp. 33.273.800 atau 99,99% digunakan untuk penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 12 kali selama 12

bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.9
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	33.278.200,-	33,273.800.-
2	Keluaran	jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 kl	12 kl
3	Hasil	lingkungan pasar dan kantor bersih	100%	99.99%

10. Sub Keg. Penyediaan bahan logistic Kantor.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 489.272.000,-
 terealisasi sebesar Rp. 488.818.609.-
 atau 91,73% digunakan untuk operasional kantor dan kegiatan lapangan. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah penyediaan bahan logistic kantor sebanyak 12 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 2.10 di bawah ini :

Tabel 2.1.10
Penyediaan bahan logistik Kantor

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	489.272.000,-	488.818.609.-
2	Keluaran	jumlah penyediaan bahan cetak, rapat keg lapangan	12 kl	12 kl
3	Hasil	Untuk kebutuhan makan dan minum bagi pegawai dan petugas keamanan	100%	91,73%

11. Sub Keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 35.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 32.100.100,- atau 91,71% digunakan untuk bahan cetak pengelolaan administrasi penerimaan retribusi daerah. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 12 Kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	35.000.000	32.100.100.-
2	Keluaran	jumlah barang cetakan blanko penerimaan retribusi pasar.	12 kl	12 kl
3	Hasil	Peningkatan tertib administrasi penerimaan retribusi daerah.	100%	91,71%

12. Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 7.500.000,- terrealisasi sebesar Rp. 7.500.000,- atau 100% digunakan untuk bahan bacaan dan peningkatan pengetahuan dan wawasan. Hasil yang dicapai/ outcome kegiatan yaitu jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, selama 12 kali selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.12
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	7.500.000	7.500.000.-
2	Keluaran	jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	12 kl	12 kl
3	Hasil	Menambah wawasan dan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan perundang-undangan.	100%	100%

13. Sub Keg. Fasilitas Kunjungan Tamu.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 42.050.000,- terrealisasi sebesar Rp. 41.965.000,- atau 99,80% digunakan untuk kebutuhan makanan dan minuman tamu. Hasil yang dicapai/ outcome kegiatan yaitu jumlah fasilitas kunjungan tamu sebanyak 14 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.13
Fasilitas Kunjungan Tamu

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	42.050.000,-	41.965.000,-

2	Keluaran	jumlah tamu yang datang .	14 kl	14 kl
3	Hasil	Terlayani tamu yang datang	100%	99,80%

14. Sub Keg. Penyelenggaraan rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 465.988.000,-
 terealisasi sebesar Rp. 461.577.544.- atau 99,05%
 digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka untuk
 mendukung pembangunan daerah. Hasil yang dicapai/out
 come kegiatan yaitu jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan
 konsultasi SKPD yang dilaksanakan sebanyak 75 kl selama 12 bulan.
 Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di
 bawah ini :

Tabel 2.1.14

Penyelenggaraan rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD.

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	465.988.000,-	461.577.544
2	Keluaran	jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	75 kl	75 kl
3	Hasil	Penyampaian informasi program dan kegiatan pembangunan daerah	100%	99.05%

4. Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

15. Sub Keg. pengadaan peralatan dan mesin lainnya.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 135.292.070,-
 terealisasi sebesar Rp. 127.727.700.- atau
 94,41% digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan untuk me
 ndukung pelaksanaan tugas . Hasil yang dicapai/out
 come kegiatan yaitu jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 yang diadakan sebanyak 6 unit selama 12
 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di
 bawah ini :

Tabel 2.1.15

Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Narasi	Tolak ukur	Kinerja
--------	------------	---------

o			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	135.292.070,-	127.727.700
2	Keluaran	jumlahpengadaanperalatan dan mesinlainnya yang diadakan	6 unit	6 unit
3	Hasil	Melaksanakanberbagaikegiatanadministrasiuntukmendukungpelaksanaantugas	100%	94,41%

5. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

16. Sub Keg. Penyediaan jasa surat menyurat.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,-, terrealisasi sebesar Rp. 15.000.000.-

atau 100% digunakan untuk melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kwitansi bermaterai dan pemindahbukuan. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 1500 lbr selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.16
Penyediaan jasa surat menyurat

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	15.000.000	15.000.000
2	Keluaran	jumlah penyediaan jasa surat menyurat	125 lbr	125 lbr
3	Hasil	Tertib administrasi jasa surat menyurat	100%	100%

17. Sub Keg. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 401.000.000,-, terrealisasi sebesar Rp. 345.239.004,-

atau 86,09% digunakan untuk pembayaran rekening telepon, air dan listrik. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik sebanyak 4 langgan selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.17
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	401.000.000	345.239.004

2	Keluaran	jumlahbulanpembayaranrekeninglistrik.air dan telpon	4 langganan	4 langganan
3	Hasil	Terlaksananya pembayaran rekening listrik air telpon	100%	86,09%

18. Sub Keg. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 180.600.000,-
 terealisasi sebesar Rp. 180.000.000,- atau 99,67%
 digunakan untuk kegiatan jasa pelayanan umum kantor. Hasil yang
 dicapai/out
 come kegiatan yaitu jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 yang disediakan sebanyak 12 kl selama 12 bulan.
 Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di
 bawah ini :

Tabel 2.1.18
 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	180.600.000	180.000.000
2	Keluaran	jumlah pembayaran honorarium petugas cleaning service kantor	12 kl	12 kl
3	Hasil	Tertib pengawasan dan terciptanya kebersihan kantor yang sehat dan nyaman	100%	99.67%

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah

19. Sub

Keg. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional dan angkutan.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 153.977.000.-
 terealisasi sebesar Rp. 145.649.755,- atau 94,59%
 digunakan untuk pembayaran pajak kendaraan operasional, jasa
 service, suku cadang dan operasional angkutan sampah. Hasil yang
 dicapai/out
 come kegiatan yaitu jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas operasional

taulapangan yang diadakan sebanyak 4 unit selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.19

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional dan taulapangan.

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	153.977.000	145.649.755,-
2	Keluaran	jumlah kendaraan operasional, pajak dan perijinan	4 unit	4 unit
3	Hasil	Terbayar kendaraan operasional dan penggantian suku cadang	100%	94,59%

20. Sub Keg. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 70.400.000,- terrealisasi sebesar Rp. 39.390.000,- atau 98,73% digunakan untuk pemeliharaan peralatan kantor. Hasil yang dicapai / out come kegiatan yaitu jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan sebanyak 40 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.20

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	70.400.000,-	39.390.000,-
2	Keluaran	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	40 kl	40 kl
3	Hasil	untuk kelancaran administrasi pelayanan dan kelancaran kinerja	100%	98,73%

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

7. Kegiatan Pemeriksaan

pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten / kota.

dan

wilayah

21. Sub

Keg. Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas operasi kewenang kabupaten/kota.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 130.000.000,-
terrealisasi sebesar Rp. 129.594.000.- atau 99,69%
digunakan untuk melakukan pengawasan kekuatan, kesehatan kemandirian dan ketangguhan operasi. Hasil yang dicapai/output
kegiatan yaitu jumlah pengawasan kekuatan, kesehatan kemandirian dan ketangguhan serta akuntabilitas operasi sebanyak 3 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.21

Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas operasi kewenang kabupaten/kota.

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	130.000.000	129.594.000
2	Keluaran	jumlah pengawasan kekuatan, kesehatan kemandirian dan ketangguhan serta akuntabilitas operasi	3 kl	3 kl
3	Hasil	Peningkatan pengawasan pengelolaan dan pengurus operasi	100%	99,69 %

22. Sub

Keg. Pemeriksaan kepatuhan operasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenang kabupaten/Kota.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 85.600.000,- terrealisasi sebesar Rp. 85.301.000.- atau 99,65%
digunakan untuk peningkatan kepatuhan operasi terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil yang dicapai/output
kegiatan yaitu jumlah pemeriksaan kepatuhan operasi terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 4 kali selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.22

Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/Kota

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	85.600.000	85.301.000,-
2	Keluaran	Jumlah pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	4 kl	4 kl
3	Hasil	Peningkatan pengetahuan dan wawasan pengurus koperasi tentang peraturan perundang-undangan	100%	99,65 %

3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

8. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayahnya keanggotaannya ada dalam daerah kabupaten/Kota.

23. Sub Keg. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan

perkoperasian sertakapasitas dan kompetensi SDM koperasi.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 300.400.000,-

terrealisasi sebesar Rp. 294.650.700,- atau 98,09%

digunakan untuk memberikan Pendidikan dan

peningkatan pengetahuan SDM pengurus dan

pengelola koperasi hasil yang dicapai/out

come kegiatan yaitu jumlah peningkatan pemahaman dan

pengetahuan perkoperasian sertakapasitas dan kompetensi SDM

koperasi sebanyak 2 kali selama 12 bulan.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.23

Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian sertakapasitas dan kompetensi SDM koperasi

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	300.400.000,-	294.650.700,-
2	Keluaran	jumlah peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian sertakapasitas dan kompetensi SDM koperasi	2 kl	2 kl

3	Hasil	Peningkatan pengetahuan dan sdm bagi pengelola dan pengurus koperasi	100%	98,09%
---	-------	--	------	--------

4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

9. Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya adalah daerah kabupaten / kota.

24. Sub Keg. Pemberdayaan peningkatan produktivitas nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 90.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 89.890.000,- atau 99,88%

digunakan untuk peningkatan produktivitas, akses pasar, pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi. Hasil yang dicapai/out

come kegiatan yaitu jumlah pemberdayaan peningkatan produktivitas nilai tambah akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi. Sebanyak 2 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.24

Pemberdayaan peningkatan produktivitas nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan, manajemen standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	90.000.000	89.890
2	Keluaran	Jumlah pemberdayaan peningkatan produktivitas nilai tambah akses pasar, pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi.	2 kl	2 k
3	Hasil	Peningkatan produktivitas dan penguatan kelembagaan usaha koperasi	100%	99.88

5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

10. Kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan

25. Sub Keg. Pendataan potensi dan pengembangan usahamikro

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.850.390.000,-
terrealisasi sebesar Rp. 644.493.500,- atau 22,61%
digunakan untuk meningkatkan kemampuan para
pelaku usahamikro. Hasil yang dicapai/out
come kegiatan yaitu jumlah pendataan potensi dan
pengembangan usahamikro sebanyak 180 klp/umk selama 12 bulan.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada table di
bawah ini :

Tabel 2.1.25
Pendataan potensi dan pengembangan usahamikro

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	2.850.390.000,-	644.493.500
2	Keluaran	Jumlah pendataan potensi dan pengembangan usahamikro	180 klp	6 klp
3	Hasil	Tersedia data usaha/klp usahamikro	100%	22,61 %

26. Sub Keg. Fasilitas kemudahan perizinan usahamikro.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 160.000.000,-
terrealisasi sebesar Rp. 157.299.000,- atau 98,31%
digunakan untuk memberikan fasilitas dalam perizinan usahamikro.
Hasil yang dicapai/out
come kegiatan yaitu jumlah fasilitas kemudahan perizinan usahamikro
sebanyak 30 UMK selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian
di atas dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.1.26
Fasilitas kemudahan perizinan usahamikro

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	160.000.000	157.299.000
2	Keluaran	jumlah fasilitas kemudahan perizinan usahamikro	30 umk	30 umk
3	Hasil	Memudahkan pemasaran usahamikro yang memiliki legalitas	100%	98,31%

27. Sub Keg. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usahamikro.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 200.400.000,-
 terealisasi sebesar Rp. 199.700.000,- atau 99,35% digunakan untuk meningkatkan pemberdayaan kelembagaan potensi dan usahamikro. Hasil yang dicapai/out come kegiatannya yaitu jumlah usahamikro yang memiliki legalitas usaha sebanyak 29 umk selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.27
 Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usahamikro

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	200.400.000	199.700.000
2	Keluaran	Jumlah pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usahamikro	30 umk	30 umk
3	Hasil	Pengembangan potensi usahamikro	100%	99,35

6. Program Pengembangan UMKM

11. Kegiatan Pengembangan usahamikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usahamikro

28. Kegiatan Fasilitas usahamikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran SDM, sertadesain dan teknologi.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 410.060.000,-
 terealisasi sebesar Rp. 394.543.747,- atau 96,22% digunakan untuk memfasilitasi usahamikro menjadi usaha kecil, pengembangan produksi, pengolahan, pemasaran desain dan teknologi. Hasil yang dicapai/out come kegiatannya yaitu jumlah Fasilitas usahamikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SSM sertadesain dan teknologi sebanyak 128 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel2.1.28

Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran SDM, sertadesain dan teknologi

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	410.060.000	394.543.747
2	Keluaran	jumlahfasilitasiusaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SDM sertadesain dan teknologi	128 kl	126 kl
3	Hasil	Para pengurus koperasi mempunyai kemampuan pengetahuan tentang perkoperasian	100%	96,22%

7. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

12. Kegiatan Penerbitan tanda daftar gudang

29. Sub Keg Fasilitas penerbitan tanda daftar gudang.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 85,247.500.- atau 85,25% digunakan untuk fasilitas layanan penerbitan tanda daftar gudang. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah fasilitas penerbitan tanda daftar gudang sebanyak 8 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel2.1.29

Fasilitas penerbitan tanda daftar gudang.

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	100.000.000,	85,247.500
2	Keluaran	jumlah rekomendasi penerbitan tanda daftar gudang	8 kl	7 kl
3	Hasil	Fasilitas rekomendasi penerbitan tanda daftar gudang	100%	85,25%

13. Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit Surat keterangan asal)

30. Sub Keg Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 58.397.000,- terrealisasi sebesar Rp. 41.113.000,- atau 70.40% digunakan untuk koordinasi dan layanan penerbitan SKA. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah koordinasi dan

sinkronisasi layanan penerbitan SKA sebanyak 8 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.30

Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA.

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	58.397.000	41.113.000
2	Keluaran	jumlah koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA	8 kl	7 kl
3	Hasil	Terbitnya data layanan penerbitan SKA	100%	70,40%

8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

13. Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana distribusi perdagangan.

31. Sub Keg. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.824,100.000,-
 terrealisasikan sebesar Rp. 1.788.146.767,- atau 98,03%
 digunakan untuk sarana distribusi perdagangan. Hasil yang
 dicapai/out

come kegiatan yaitu jumlah penyediaan sarana distribusi perdagangan
 sebanyak 5 paket selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di
 atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.31

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	1.824,100.000,-	1.788.146.767
2	Keluaran	jumlah penyediaan sarana distribusi perdagangan	5 kl	5 kl
3	Hasil	Peningkatan ekonomi masyarakat	100%	98.03%

32. Sub Keg. Fasilitas pengelolaan Sarana distribusi perdagangan.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 266.975.000,-
 terrealisasikan sebesar Rp. 242.815.971,- atau 90.95%
 digunakan untuk peningkatan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
 Hasil yang dicapai/out

comekiatanyaitujumlahfasilitasipengelolaansaranadistribusiperdagangansebanyak 48 kl selama 12 bulan. Untuklebihjelasnyadariuraian di atasdapatdilihat pada tabel dibawahini :

Tabel 2.1.32
Fasilitasipengelolaan Sarana distribusiperdagangan

N o	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	266.975.000	242.815.971
2	Keluaran	jumlahfasilitasipengelolaansaranadistribusiperdagangan	48 kl	45 kl
3	Hasil	Peningkatanperekonomianmasyarakat	100%	90,95

14.

KegiatanPembinaanterhadapPengelolaansaranadistribusiperdaganganmasyarakatdiwilayahkerjanya.

33. Sub Keg.Pembinaan dan pengendalianpengelolaan Sarana distribusiperdagangan.

Anggaranuntukkegiataninisebesar Rp. 80.000.000,-
terrealisasisebesar Rp.80.000.000.-atau 100%
digunakanuntukpembinaanpengendalianpengelolaansaranadistribusiperdagangan.
Hasil yang dicapai/out
comekiatanyaitujumlahpembinaan,penertiban dan
penataansaranaperdagangansebanyak50 kl selama 12 bulan.
Untuklebihjelasnyadariuraian di atasdapatdilihat pada table di
bawahini :

Tabel2.1.33
Pembinaan dan pengendalianpengelolaan Sarana
distribusiperdagangan

N o	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	80.000.000	80.000.000
2	Keluaran	Jumlahpembinaa dan pengendalianpengelolaansaranadistribusiperdagangan	50 kl	50 kl
3	Hasil	Tertibpengelolaansaranadistribusiperdagangan	100%	100%

9. Program Stabilisasi Harga BarangKebutuhanPokok dan BarangPenting

15. Kegiatan Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota.

34. Sub Keg. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam system informasi perdagangan.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 323.824.300,-
 telah dilaksanakan sebesar Rp. 177.151.800,- atau 54,71%
 digunakan untuk peningkatan informasi daftar
 harga kebutuhan pokok barang penting. Hasil yang dicapai/out
 come kegiatan yaitu jumlah pemantauan harga dan
 stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar
 rakyat sebanyak 96 kali selama 12 bulan.
 Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di
 bawah ini :

Tabel 2.1.34

Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan
 barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam system
 informasi perdagangan

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	323.824.300	177.151.800,-
2	Keluaran	jumlah Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam system informasi perdagangan	96 kl	96 kl
3	Hasil	Tersedianya data daftar harga kebutuhan barang pokok masyarakat	100%	54,71 %

10. Program STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

16. Kegiatan Pelaksanaan metrology legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan

35. Sub Keg. Pelaksanaan metrology legal, berupa tera, tera ulang. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 228.682.500,- telah dilaksanakan sebesar Rp. 155.246.646,- atau 67,89% digunakan untuk peningkatan pelaksanaan tera, tera ulang semua peralatan ukur, takar timbang dan perlengkapannya. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang sebanyak 1000 bh selama 12 bulan.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.35

Pelaksanaan metrology legal,berupatara,teraulang.

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	228.682.500	155.246.646
2	Keluaran	jumlah Pelaksanaan metrology legal berpatara,teraulang	1 kl	0.72 kl
3	Hasil	Terjaminnya kwalitas alat ukur, takar timbangan dan perlengkapannya abertandasah	100%	67,89%

36. Sub Keg. Pengawasan/ penyuluhan metrology legal.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 85.000.000,- terrealisas sebesar Rp.83.000.000,- atau 97,65% digunakan untuk peningkatan pengawasan dan penyuluhan alat ukur takar timbangan metrology legal. Hasil yang dicapai/ outcome kegiatan yaitu jumlah pengawasan/ penyuluhan metrology legal sebanyak 12 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.36

Pengawasan/ penyuluhan metrology legal

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	85.000.000	83.000.000
2	Keluaran	jumlah pengawasan/ penyuluhan metrology legal	12 kl	12 kl
3	Hasil	Tertib peralatan ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya	100%	97,65%

37. Sub Keg. Penyidikan metrology legal.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 65.502.400,- terrealisas sebesar Rp.55.853.221,- atau 85,27% digunakan untuk peningkatan peralatan ukur, takar timbangan dan perlengkapannya. Hasil yang dicapai/ outcome kegiatan yaitu jumlah penyidikan metrology legal sebanyak 1000 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.37**Penyidikan metrology legal.**

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	65.502.400	55,853,221
2	Keluaran	jumlahpenyidikan metrology legal	1000 bh	954bh
3	Hasil	Tertibalatur dan konsumencerdas	100%	95,40%

10. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri**17. Kegiatan Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan pembangunan.****38. Sub Keg. Peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,-
 terealisasi sebesar Rp. 44.826.000,- atau 89,95%
 digunakan untuk peningkatan promosi, pemasaran dan
 pembangunan industri. Hasil yang dicapai/out
 come kegiatannya yaitu jumlah peningkatan system dan
 jaringan informasi perdagangan sebanyak 30 kali selama 12 bulan.
 Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada
 tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.38**Peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan.**

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	50.000.000	44.826.000.-
2	Keluaran	Jumlah peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan	30 kl	27 kl
3	Hasil	Tersedianya data dan informasi pembangunan industri	100%	89,95%

11. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**18. Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota.****39. Sub Keg. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 120.000.000,- terealisasi sebesar
 Rp. 119.893.322.- atau 99,91%
 digunakan untuk peningkatan koordinasi, sinkronisasi pembangunan sum
 ber daya industri. Hasil yang dicapai/out
 come kegiatannya yaitu jumlah koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pembang

unansumberdayaindustrisebanyak3lkm/klpselama 12 bulan.
Untuklebihjelasnyadariuraian di atasdapatdilihat pada
tabel dibawahini :

Tabel 2.1.39

Koordinasi,sinkronisasi, dan
pelaksanaanpembangunansumberdayaindustri.

N o	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masuk an	Dana	120.000. 000	119.893.3 22.-
2	Keluar an	jumlahkoordinasi,sinkronisasi pelaksanaanpembanguna nsumberdayaindustri	3 ikm/klp	3 ikm/klp
3	Hasil	Trampildalampengelolaandesainteknologi	100%	99.91 %

**40.Sub KegiatanKoordinasi,sinkronisasi, dan
pelaksanaanpembangunansarana dan prasaranaindustri.**

Anggaranuntukkegiataninisebesar Rp. 1.651.500.000,-
terrealisasebesar Rp.932.325.547.-atau 56,45%
digunakanuntukpeningkatankordinasi,sinkronisasi
pembangunansara
naprasaranaindustri. hasilyang dicapai/out
comekegiatanyaitujumlahkoordinasi,sinkronisasi
pelaksanaanpembang
unansarana dan prasaranaindustrisebanyak 22 klp/IKM selama 12
bulan. Untuklebihjelasnyadariuraian di atasdapatdilihat pada tabel
2.35 di bawahini :

Tabel 2.1.40

Koordinasi,sinkronisasi, dan pelaksanaanpembangunansarana dan
prasaranaindustri.

N o	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masuk an	Dana	1.651.500. 000	932.325.54 7.-
2	Keluar an	jumlahkoordinasi,sinkronisasi pelaksanaanpemban gunansarana dan prasaranaindustri	22 ikm/klp	16 ikm/klp
3	Hasil	Tersedianyasarana pembangunanindustri	100%	56,45%

**41.Sub KegiatanKoordinasi,sinkronisasi, dan
pelaksanaanpemberdayaanindustri dan peransertamasyarakat.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 240.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 239.500.494,- atau 99,79% digunakan untuk peningkatan pemberdayaan industri didukung peransert masyarakat. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah koordinasi, sinkronisasi pemberdayaan industri dan peransert masyarakat sebanyak 7 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.41

Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peransert masyarakat.

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	240.000.000	239.500.494
2	Keluaran	jumlah koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan industri dan peransert masyarakat	7 kl	7 kl
3	Hasil	Keikutsertaan peransert masyarakat dalam pemberdayaan industri	100%	99,79%

12. Program Pengendalian izin usaha industri

19. Penerbitan izin usaha industri (IUI), izin usaha perluasan industri (IUPI), Izin usaha kawasan industri (IUKI), dan izin perluasan kawasan industri (IPKI), kewenangan kab/Kota berbasis sistem informasi industri.

42. Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kab/Kota berbasis sistem informasi industri nasional (SIINAS)

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100% digunakan untuk koordinasi sinkronisasi penerbitan dan perluasan kawasan industri. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kab/Kota berbasis sistem informasi industri nasional (SIINAS) sebanyak 2 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.42

Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI kewenangan kab/kota berbasis sistem informasi industri nasional (SIINAS)

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	15.000.000	15.000.000
2	Keluaran	jumlah Fasilitas pengumpulan pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINAS)	2 kl	2 kl
3	Hasil	Tersedia dokumen data analisis dan kawasan industri melalui sistem informasi industri nasional (SIINAS)	100%	100%

13. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

20. Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUT, IPU, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota.

43. Kegiatan Fasilitas pengumpulan pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINAS).

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 88.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 85.872.100.- atau 97,58% digunakan untuk peningkatan fasilitas dan analisis data industri. Hasil yang dicapai/output kegiatan yaitu jumlah Fasilitas pengumpulan pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINAS) sebanyak 1 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.43

Fasilitas pengumpulan pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINAS).

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	88.000.000	85.872.100.-
2	Keluaran	jumlah Fasilitas pengumpulan pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINAS)	1 kl	1 kl

3	Hasil	Tersedianyadokumen data analisis dan kawasanindustrimelalui sistem informasi industri nasional (SIINas	100%	100%
---	-------	--	------	------

Program dan kegiatan
Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada table
berikut ini:

No	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Presentasi		Ket
					K	Rp	
I	Prog Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Persentase layanan dukungan administrasi sekretariat yang sesuai SOP*)	11.234.959.662	10.302.813.069	98,80	91,70	
1	Keg. Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Persentase layanan dukungan administrasi sekretariat yang sesuai SOP*)	365.351.500	360.489.058	100	98,70	
1	Sub Keg. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	229.085.000	244.810.058	100	98,13	
2	Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD	138.146.500	135.679.000	100	99,66	
2	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*)	8.810.420.892	8.008.193.133	100	90,89	
3	Sub Keg. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	6.939.008.692	6.175.300.933	100	88,99	
4	Sub Keg. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah pengelolaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1.378.327.200	1.368.727.200	100	99,30	
4	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan SKPD yang tersusun	488.585.000	459.665.000	100	94,08	
5	Sub Keg. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan tahunan	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan	3.500.000	3.500.000	100	100	
6	Sub Keg. Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	1.000.000	1.000.000	100	100	
4	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*)	1.103.038.200	1.051.005.353	100	95,28	
8	Sub Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	29.950.000	29.949.900	100	100	
9	Sub Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	33.278.200	33.273.800	100	99,99	
10	Sub Keg. Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	489.272.000	448.818.609	100	91,73	
11	Sub	Jumlah penyediaan barang cetak	35.000.000	32.100.100	100	91,71	

	Keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	dan enggandaan					
12	Sub Keg. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah terbitan bahan bacaan	7.500.000	7.500.000	100	100	
13	Sub Keg. Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu	42.050.000	41.965.000	100	99,80	
14	Sub Keg. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi ke luar daerah dan dalam daerah	465.988.000	461.577.544	100	99,05	
5	Keg. Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu*)	135.292.070	127.727.700	100	94,41	
15	Sub Keg. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	135.292.070	127.727.700	100	94,41	
6	Keg. Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	596.600.000	540.239.004	100	90,55	
16	Sub Keg. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	15.000.000	15.000.000	100	100	
17	Sub Keg. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	401.000.000	346.239.004	100	86,09	
18	Sub Keg. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	180.600.000	180.000.000	100	99,67	
7	Keg. Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *)	224.377.000	215.158.821	100	95,89	
19	Sub Keg. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional	153.977.000	145.649.755	100	94,59	
20	Sub Keg. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	70.400.000	69.509.066	100	98,73	
II	Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah		4.226.850.000	1.994.872.547	56,17	47,20	
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	215.600.000	214.895.600	100	99,67	
8	Keg. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/ kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	215.600.000	214.895.600	100	99,67	
22	Sub Keg. Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/ kota.	Jumlah pengawasan revitalisasi dan fasilitasi RAT	130.000.000	129.594.000	100	99,69	
22	Sub Keg. Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/ kota.	Jumlah pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/ kota	85.600.000	85.301.000	100	99,65	
IV	Program Pendidikan dan Latihan perkoperasian	Persentase Koperasi yang Mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	300.400.000	294.650.700	100	98,09	
11	Keg. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayahnya keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ Kota.	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	3300.400.000	294.650.700	100	98,09	
25	Sub Keg. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi..	Jumlah bintek pengembangan Persentase koperasi yang diberikandukungan fasilitas pembiayaan SDM koperasi dan jlh pelaksanaan sosialisasi perkoperasian	300.400.000	294.650.700	100	98,09	
V	Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang diberikandukungan fasilitas pembiayaan	90.000.000	89.890.000	100	99,88	

13	Keg. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya ada di daerah kabupaten / kota.	Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan oleh pemerintah daerah	90.000.000	89.890.000	100	99,88	
27	Sub Keg. Pemberdayaan peningkatan produktivitas nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah fasilitas kemitraan dan sarana usaha monitoring dan evaluasi koperasi koperasi penerima dana bantuan rapatevaluasi NRB	90.000.000	89.890.000	100	99,88	
VI	Program pemberdayaan usaha menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	3.210.790.000	1.000.892.500	41,19	3,17	
14	Keg. pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	3.210.790.000	1.000.892.500	41,19	3,17	
28	Sub Keg. pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro.	Jumlah fasilitas sarana produksi UMK	2.850.390.000	644.493.500	33,75	22,61	
29	Sub Keg. Fasilitas kemudahan perizinan usaha mikro.	Jumlah usaha mikro kecil yang memiliki legalitas usaha	160.000.000,	157.299.000	100	98,31	
30	Sub keg. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro.	Jumlah usaha mikro kecil yang memiliki legalitas usaha	200.400.000	199.100.000	100	99,35	
VII	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	410.060.000	394.543.747	98,44	96,22	
15	Keg. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha mikro	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha	410.060.000	394.543.747	98,44	96,22	
31	Kegiatan Fasilitas usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran SDM, sertifikasi desain dan teknologi.	Jumlah UMK yang didukung pengetahuan dan teknologi dan jumlah promosi produk UMKM	410.060.000	394.543.747	98,44	96,22	
	URUSAN PERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		3.082.481.200	2.752.400.905	84,72	89,32	
VIII	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	158.397.000	126.360.500	84,70	79,71	
	Penerbitan tanda daftar perusahaan	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100.000.000	85.247.500	85,53	85,25	
	Fasilitas penerbitan tanda daftar gudang	Jumlah rekomendasi penerbitan tanda daftar gudang	100.000.000	85.247.500	85,53	85,25	
16	Keg. Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	58.397.000	41.113.000	83,13	70,40	
32	Sub Keg. Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA.		58,397.000	41.113.000	83,13	70,40	
IX	Program Peningkatan Sarana distribusi perdagangan	Persentase pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	2.171.075.000	2.110.962.738	99,23	97,23	
17	Sub Keg. Pembangunan dan pengelolaan Sarana distribusi perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.091.075.000	2.030.962.738	99,20	97,13	
33	Sub Keg. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan.	Jumlah pasar yang dibangun dan jumlah pemeliharaan bangunan pasar	1.824.100.000	1.788.146.767	100	98,03	
34	Sub Keg. Fasilitas pengelolaan Sarana distribusi perdagangan.	Jumlah pemeliharaan saluran air, jumlah bersih, taman, pengawasan kebersihan pasar dan tim kebersihan adipura	266.975.000	242.815.971	93,75	90,95	

18	Program Pembinaan terhadap Pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.	Persentase Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	80.000.000	80.000.000	100	100	
35	Sub Keg. Pembinaan dan pengendalian pengelolaan Sarana distribusi perdagangan.	Jumlah pembinaan/penertiban usaha pedagang	80.000.000,-	80.000.000	100	100	
X	Program Stabilisasi Harga barangKebutuhanPokok dan Barangpenting	Persentase stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	323.824.300	177.151.800	100	54,71	
19	Keg. Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota.	Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	323.824.300	177.151.800	100	54,71	
36	Sub Keg. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan.	Jumlah informasi dan data kebutuhan harga bahan pokok penting pasar rakyat	323.824.300	177.151.800	100	54,71	
XI	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dan Barang/Jasa yang beredar	379.184.900	294.099.867	81,37	77,56	
20	Program Pelaksanaan metrology legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	379.184.900	294.099.867	81,37	77,56	
37	Sub Keg. Pelaksanaan metrology legal, berupa tera, tera ulang.	Jumlah peningkatan SDM dan terciptanya sarana/prasarana operasional metrologi	228.982.500	155.246.646	72,00	67,89	
38	Sub Keg. Pengawasan/penyuluhan metrology legal.	Jumlah jaminan kebenaran hasil pengukuran dan kelancaran pelaksanaan rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah dan terlindunginya konsumen dan terawasinya barang 12 kl beredar dan jumlah peningkatan SDM dan terciptanya sarana/prasarana operasional metrologi	85.000.000,-	83.000.000	100	97,65	
39	Sub Keg. Penyidikan metrology legal.	Jumlah terciptanya jaminan kebenaran hasil pengukuran dan jumlah potensial UTTP	65.502.400	55.853.221	89,90	86,27	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	50.000.000	44.826.000	90,00	89,65	
	Pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase Pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	50.000.000	44.826.000	90,00	89,65	
	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Peningkatan sistem dan informasi jaringan perdagangan	50.000.000	44.826.000	90,00	89,65	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		2.114.500.000	1.392.591.463	102,88	65,86	
XII	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan IKM	2.011.500.000	1.291.719.363	78,73	64,22	
21	Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait	2.011.500.000	1.291.719.363	78,73	64,22	
41	Sub Keg. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumbu berdaya industri.	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumbu berdaya industri	120.000.000	119.893.322	100	99,91	
42	Sub Keg. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri.	Jumlah Pengembangan inovasi produksi IKM/sarana dan prasarana industri	1.651.500.000	932.325.547	74,09	56,45	
43	Sub keg. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran masyarakat	jumlah Pembinaan keterampilan pengrajin promosi dan raker	240.000.000	239.500.494	100	99,79	

	Program pengendalian izin usaha industri	Persentase jumlah hasil pemanfaatan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang	15.000.000	15.000.000	100	100	
	Penerbitan izin usaha industri (IUI) izin perluasan usaha industri (IPUI) izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) kewenangan/kotaberbasis system informasi industri	Jumlah penerbitan izin usaha industri (IUI) izin perluasan usaha industri (IPUI) izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI)	15.000.000	15.000.000	100	100	
	Koordinasi dan sinkronisasi di bidang industri dalam lingkup IUI, IUPi, IUKI, IPKI kewenangan kab/kota berbasis system informasi industri nasional (SIINAS)	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IUPi, IUKI, IPKI kewenangan kab/kota berbasis system informasi industri nasional	15.000.000	15.000.000	100	100	
XIII	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase penyediaan system informasi data industri secara lengkap dan terkini	88.000.000	85.872.100	100	97,58	
	Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota.	Persentase perusahaan Industri dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota yang masuk dalam SII NAS	88.000.000	85.872.100	100	97,58	
44	Sub Keg. Fasilitas pengumpulan pengolahan dan analisis data industri data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINAS).	Jumlah data koordinasi dan sinkronisasi	88.000.000	85.872.100	100	97,58	
Jumlah			20.658.790.862	16.447.857.584	88,21	79,52	

44. Kebijakan Strategis yang dilaksanakan

Kebijakan Strategi disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang selaras dengan rencana program dan kegiatan prioritas. Dalam rancangan awal Strategi yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Koperasi dan Perdagangan mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

Strategi Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru dalam rangka mencapai visi, misi pemerintah daerah, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain:

Strategis	Arah kebijakan
Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM	Peningkatan akses teknologi, kualitas produk permodalan dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM
Mengembangkan industri dan perdagangan	Peningkatan volume dan nilai industri dan perdagangan
Meningkatkan kualitas SDM bagi para	1. Melaksanakan bimbingan teknis/pelatihan bagi para

pelaku IKM, koperasi dan UMKM	Pembina, pelaku IKM, koperasi dan UMKM 2. Menumbuhkembangkanwirausahabarusebagai salah satu factor penggerakperekonomiandaerah
Meningkatkanperanankoperasi dan UMKM,industri dan perdagangansebagaipelakuekonomi yang berdayasaingtinggi	1. Meningkatkan nilaitambah dan nilaijualproduk-produk UMKM dan Koperasi 2. Meningkatkanaksespermodalan dan pemasaranproduk-produk UMKM dan Koperasi
Mewujudkanstrukturperekonomian yang kokohdenganmenjadikan industry rakyatsebagai motor penggerak dan industry perdagangan dan jasasebagai pendukung.	1. Mengembangkan industry berbasis sumberdayaterutamapertanian, perikananperkebunan 2. Membangunklaster industry sesuaidenganpotensiunggulandaerah masing-masing 3. Mengembangkan sector perdagangan dan jasasebagai penggerakrodaperekonomianmasyarakat at 4. Melakukanmenataan / pengawasanperdagangan

2.2.1.Indikatorkinerjakuncikeluaran (Output)

Dinas Koperasi Perindustrian dan PerdaganganKabupatenKotabaru

No	UrusanPemerintahan	Indikatorkinerjakuncikeluaran		Capaiankinerja	Sumber data	ket
1	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.1	Persentasefasilitasipenerbitanijin usahasimpanpinjamuntukkoperasi dengan wilayah keanggotaandalamdaerahkabupaten/kota	$12 / 19 \times 100 \% = 63,15 \%$	Dinas Koperasi perindustrian dan perdaganganKabKotabaru	
		1.2	Persentasefasilitasipenerbitanizin pembukaankantorcabang, cabangpembantu dan kantor kas usahasimpanpinjam oleh koperasiuntukkoperasi dengan wilayah keanggotaandalamdaerahkabupaten/kota	$6 / 10 \times 100 = 60 \%$		
		1.3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaandalamdaerahkabupaten/kota	$70 / 110 \times 100 \% = 63,64 \%$		
		1.4	Persentase usahasimpanpinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaandalamdaerahkabupaten/kota	$13 / 19 \times 100 \% = 68,42 \%$		
		1.5	Persentase koperasi yang mengikutipelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaandalamdaerahkabupaten/kota	$66 / 110 \times 100 \% = 60 \%$		
		1.6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikutipelatihan perkoperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaandalamdaerahkabupaten/kota	$191 / 110 \times 100 = 173,636 \%$		
		1.7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaandalamdaerahkabupaten/kota	$2 / 110 \times 100 \% = 1,81 \%$		

		1.8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	$35 / 110 \times 100 \% = 31,818$		
		1.9	Persentase fasilitas penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$31 / 110 \times 100 \% = 28,181 \%$		
		1.10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$35 / 110 \times 100 \% = 31,818$		
		1.11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0		Tidak ada data
		1.12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan ke lembaga dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$51 / 108 \times 100 \% = 47,22$		
		1.13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$32 / 110 \times 100 = 29,09 \%$		
	UMKM	2.1	Rasio pertumbuhan wirasahabu yang berskala mikro	$106 / 8738 \times 100 \% = 1,21\%$		
		2.2	Persentase jumlah usahamikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0		Tidak ada data
		2.3	Persentase jumlah usahamikro yang bermitra	$2 / 106 \times 100 \% = 1,886 \%$		
		2.4	Persentase jumlah usahamikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$6 / 106 \times 100 = 5,66 \%$		
		2.5	Persentase jumlah usahamikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	$40 / 106 \times 100 \% = 37,735 \%$		
		2.6	Rasio usahamikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	$154 / 106 \times 100 \% = 145,283 \%$		
		2.7	Persentase usahamikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	$106 / 8738 \times 100 \% = 1,213\%$		
2	Perdagangan	1.1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :			Tidak ada data buktantupoksidinas
			a. Pusat perbelanjaan	0		Tidak ada data buktantupoksidinas
		1.2	b. Toko swalayan	0		
		1.3	Persentase penerbitan TDG	2		Tidak ada data buktantupoksidinas
		1.4	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	0		Tidak ada data buktantupoksidinas
		1.5	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralabada lam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralabada lam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralabada luar negeri	0		Tidak ada data buktantupoksidinas
		1.6	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan	0		

			pengawasandistribusi, pengemasan dan pelabelanbahanberbaya di tingkatdaerahKab/Kota			
		1.7	Persentasepenerbitan SKA yang tepatwaktu	170 / 1080 x 100 % = 15,74 %		
		1.8	Persentasepengembangan dan pengelolaansaranadistribusiperdagangan di wilayah kerjanya	4 / 64 x 100 = 6,25 %		1 bln 8 kl x 12 bl
		2.1	Persentasekoefisienvariasihargaa ntarwaktu	96 / 96 x 100 % = 100 %		
		3.1	Jumlahpupuk dan pestisida yang tersalurkan	8088,3 / 8142 x 100 % = 99,34 %		
		3.2	Persentasealat-alatukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulangdalamtahunberjalan	960 / 48847 x 100 % = 1,965 %		Tidakada data
3	Perindustrian	1.1	Persentasejumlahpenetapanizinusaha kawasanindustri (IUKI) dan izinperluasan kawasanindustri (IPKI) yang lokasinya di daerahkabupaten/kota	0		Tidakada data karenabukantup oksi
		2.1	Persentase terselesaikannyadokumen RPIK sampaidenganditetapkannyamenjadi PERDA	15 / 15 x 100 % = 100		
		3.1	PersentaseJumlahizin yang diterbitkanusahaindustri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	38 / 101 x 100 % = 37,623		
		4.1	Persentasejumlahizinperluasanindustri (IPUI) bagiindustri Kecil dan menengah yang diterbitkan	11 / 101 x 100 % = 10,891		
		5.1	Persentase data perusahaanindustrikecil, menengah dan perusahaan kawasanindustri di Kabupaten/Kota yang masukdalamSIINasterhadap total populasi perusahaanindustrikecil, menengah dan perusahaan kawasanindustri di Kabupaten/Kota	14 / 20 x 100 % = 70		

2.2.2. Indikator kinerjajakuncihasil (OUTCOME)

No	UrusanPemerintahan	indicator kinerjajakuncihasil		capaiankinerja
1	Koperasi, usahakecil dan menengah	1	MeningkatnyaKoperasi yang berkualitas	30 / 110 100 % 27,273
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadiwirausaha	108 / 873 100 % = 12,371
2	Perdagangan	1	Persentasepelakuusaha yang memperolehizinsesuaidenganketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	1750 / 1780 100 % 97,984
		2	Persentasekinerjarealisasi pupuk	8088,3 / 8142 x 100 % 99,34
		3	Persentasealat – alatukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	960 / 48847 100 % = 1,965
3	Perindustrian	1	Pertambahanjumlahindustrikecil dan menengah di Kabupaten/Kota	(101 -229) 229 x 100 -55,895
		2	Persentasepencapaianasaranpembangunanindustri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	15 / 15 x % = 100
		3	Persentasejumlahhasilpantauan dan pengawasandenganjumlahIzin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IndustriMenengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	31 / 101 100 % 30,693
		4	Persentasejumlahhasilpantauan dan pengawasandenganjumlahIzinPerluasanIndustri (IPUI) Kecil dan IndustriMenengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0
		5	Persentasejumlahhasilpantauan dan pengawasandenganjumlahIzin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan IzinPerluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	0
		6	Tersedianyainformasiindustrisecaralengkap dan terkini	115

--	--	--	--	--

2.5. CAPAIAN KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH

2.6. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

2.6.1 Target kinerja dan perjanjian Kinerja

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Barum melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022. Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja dan Anggaran. Perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Target Kinerja dan perjanjian kinerja tahun anggaran 2022

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target thn 2022	Program		Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	Meningkatnya tata kelola koperasi	- persentase koperasi aktif	66,67%	1	Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	11.234.959.662
		- Presentasi koperasi berkualitas	0.0%					
	Meningkatnya usaha mikro	- Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	24,44 %	2	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	36,36%	215.000.000
	Meningkatnya pembinaan industri pengolahan berbasis produk lokal	-Persentase industri kecil dengan produk yang memenuhi standar mutu	55 %	3	Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Persentase Koperasi yang Mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	47,62%	300,400.000
	Meningkatnya pelayanan metrologi dan tera	Cakupan alat ukur timbangan dan perlengkapannya yang dilakukan tera/tera ulang	40%	4	Perberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	57,14 %	90.000.000

	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana perdagangan dan ketersediaan barang pokok dan penting	-Persentase sarana dan prasarana pasar yang dikelol dengan baik	40%	5	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	40 %	1.454.970.200
		-persentase sarana dan prasarana perdagangan yang direvitalisasi	23,08%	6	Pengembangan UMKM	Persentase Usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	40 %	3.210.790.000.
		- Cakupan ketersediaan informasi harga barang pokok dan penting	100%	7	Perijinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase penerbitan ijin perusahaan	83,33 %	158.397.400
				8	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	46,15 %	2.171.075.000.
				9	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	100 %	323.824.300
				10	Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	40 %	379.184.900
				11	Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	100%	50.000.000.
					Perencanaan dan Pembangunan industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Ijin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait	40 %	2.011.500.000
				12	Pengendalian ijin usaha industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha industri (IUI) yang dikeluarkan instansi terkait	4,39%	15.000.000.
				13	Pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase Penyediaan Sistem Informasi Data Industri secara lengkap dan terkini	76 %	88.000.000

2.6.2. Pengukurancapaiankinerjadibandingdengan target perjanjiankinerja.

No	Sasaranstrategis	Indicator kinerja	Target	Realisasith n 2022	Ket
	Meningkatnya tata kelolakoperasi	persentasikoperasiaktif	66,67 %	52,88 %	
		Presentasikoperasiberkualitas	0.0%	0 %	
	Meningkatnyausahamikro	Persentasiusahamikromenjadiusahakecil	24,44 %	5,66 %	
	Meningkatnyapembinaan industry pengolahanberbasisproduklokal	Persentasi industry kecildenganproduk yang memnuhi standard mutu	55 %	49,50 %	
	Meningkatnyapelayanankemetrologian dan tera	Cakupanalatukurtimbangan dan perlengkapannya yang dilakukan tera/tera ulang	40%	1,97 %	
	Meningkatnyajumlahsarana dan prasaranaperdagangan dan ketersediaanbarangpokok dan penting	Persentasisarana dan prasarana pasar yang dikeloladenganbaik	40%	38,46 %	
		persentasisarana dan prasaranaperdagangan yang direvitalisasi	23,08%	46,15 %	
		Cakupanketersediaaninpo rmasihargapokok dan penting	100%	100 %	

2.6.3. Pengukurancapaiankinerjadibandingdengantahunsebelumnya

No	Sasaranstrategis	Indicator kinerja	Target	Realiasit hn 2022	Perbandinganth n 2021realisasi
1	Meningkatnya tata kelolakoperasi	persentasikoperasiakti f	66,67 %	52,88%	42,5 %
		Presentasikoperasiberkualitas	0.0%	0%	0 %
	Meningkatnyausaha mikro	Persentasiusahamikro menjadiusahakecil	24,44 %	5,66%	4,9 %
	Meningkatnyapembi naan industry pengolahanberbasisp roduklokal	Persentasi industry kecildenganproduk yang memnuhi standard mutu	55 %	49,50%	11,53 %
	Meningkatnyapelaya nankemetrologian dan tera	Cakupanalatukurtimbangan dan perlengkapannya yang dilakukan tera/tera ulang	40%	1,97%	1,29 %
	Meningkatnyajumlah sarana dan prasaranaperdagangan dan ketersediaanbarangpokok dan penting	Persentasisarana dan prasarana pasar yang dikeloladenganbaik	40%	38,46%	30,77 %
		persentasisarana dan prasaranaperdaganga n yang direvitalisasi	23,08%	46,15%	10,77 %
		Cakupanketersediaanin pormasihargapokok dan penting	100%	100 %	100 %

2.6.4 Pengukuran Capaian kinerja jadi dibanding dengan target dalam pembangunan jangka menengah.

No	Indikator Kinerja Utama/Sasaran	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi s/d 2020 terhadap RPJMD Tahun 2021 (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
1.	Persentase Koperasi Aktif	66,67 %	52,88 %	0,82	66,39%	8,96
2.	Persentase Koperasi Berkualitas	0.0%	0 %	0	5,00%	0
3.	Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	24,44 %	5,66 %	0,23	22,22%	22,22
4.	Persentase industri kecil dengan produk yang memenuhi standard mutu	55 %	49,50 %	0,9	100%	263,16
5	Cakupan alat ukur timbangan dan perlengkapannya yang dilakukan tera/tera ulang	40%	1,97 %	0,49	5,11%	25,55
6	Persentase sarana dan prasarana pasar yang dikelola dengan baik	40%	38,46 %	0,96	5,79%	28,95
7	persentase sarana dan prasarana perdagangan yang direvitalisasi	23,08	46,15 %	20	4,34%	0
8	Cakupan ketersediaan informasi yang akurat dan penting	100%	100 %	1.0	80%	80

2.6.5 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil yang telah dicapai

Sumber daya dalam suatu kegiatan akan berpengaruh terhadap penggunaan anggaran. Semakin sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Efisiensi ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Inovasi dalam pengelolaan sumber daya manusia pada lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan regenerasi SDM pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Kotabaru, melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tupoksi.
2. Tingkat pendidikan dasar yang paling utama dalam menyusun dan penugasan aparatur dalam mengembangkan jabatan yang diberikan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Hal ini terlihat bahwa tingkat pencapaian kinerja dan anggaran walaupun adanya pandemic COVID-19. Dari hasil pengukuran pencapaian kinerja pada tahun 2022 sasaran strategis dapat tercapai dengan baik walaupun hingga saat ini pandemic masih berlangsung. Ada beberapa sasaran strategis yang targetnya sangat kurang, yaitu;

1. Meningkatnya tata kelola koperasi dalam mewujudkan koperasi yang aktif ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 66,67% terjadi penurunan 13,79% dari pencapaian sebesar 52,88% akibat masih pandemi COVID-19. Sehingga terbatasi/terhambatnya pergerakan koperasi. Untuk koperasi yang berkualitas ditargetkan sebesar 5 % karena tidak adanya kegiatan.
2. Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil ditargetkan sebesar 24,44 % dengan kondisi masih pandemi covid -19 kegiatan usaha kecil tidak dapat tumbuh dengan baik dan tidak dapat memenuhi pencapaian target
3. Meningkatnya pembinaan industri pengolahan berbasis produk lokal ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 55% dan telah terjadi penurunan dari pencapaian target karena terbatasi pengembangan pengolahan produk lokal.
4. Meningkatnya pelayanan kemetrologian dan tera pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 40 % dari jumlah seluruh UTPP terjadi penurunan dari pencapaian target hal ini disebabkan terbatasi ruang gerak petugas akibat masih pandemi covid-

19 di berbagai sektor, kurangnya pengguna UTTP untuk melakukan tera/tera ulang.

5. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar ditahun 2022 ditargetkan sebesar 40 % dianggarkan melalui APBD akibat masih terjadinya pandemi covid-19 maka dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. sedangkan anggaran dari APBD untuk revitalisasi terus ditingkatkan sekalipun turundari target yang telah ditetapkan sebesar 23,08% sedangkan untuk informasi harga bahan pokok dan penting ditargetkan sebesar 100% dalam pendataan harga kebutuhan pokok penting dan resiko penularan covid-19 tidak terabaikan.

2.6.6. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target Kinerja

No	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Presentasi		Ket
					K	Rp	
1	Program pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	215.000.000	214.895.600	100	99,67	
	Keg. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	215.000.000	214.895.600	100	99,67	
	Sub Keg. Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota.	Jumlah Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota.	130.000.000	129.594.000	100	99,69	
	Sub Keg. Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah rakor, koordinasi, konsultasi program, koperasi prestasi dan penyuluhan perkoperasian	85,600.000	85,301.600	75.00	99.65	
2	Program Pendidikan dan pelatihan perkoperasian.	Persentase Koperasi yang Mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	300.400.000	294650.700	100	98,09	
	Keg. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/KOTA	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	300.400.000	294650.700	100	98,09	
	Sub	Jumlah Peningkatan pema	300.400.000	294650.700	100	98,09	

	Keg Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi..	hamandan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi					
	Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	90.000.000	89.890.000	100	99,98	
	Keg. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan oleh pemerintah daerah	90.000.000	89.890.000	100	99,98	
25	Sub Keg. Pemberdayaan peningkatan produktivitas nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan rekstrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Pemberdayaan peningkatan produktivitas nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan rekstrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	90.000.000	89.890.000	100	99,98	
	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	3.210.790.000	1.000.892.500	41,19	41,19	
	Keg. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan kemitraan, kemudahan, perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Peresentase Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan kemitraan, kemudahan, perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	3.210.790.000	1.000.892.500	41,19	41,19	
	Sub Kegiatan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro.	Jumlah pendataan potensi pengembangan usaha mikro	2.850.390.000	644.495.500	33,75	22,61	
	Sub Kegiatan Fasilitas kemudahan perizinan usaha mikro.	Jumlah fasilitas kemudahan perizinan usaha mikro	160.000.000,	157.299.000	100	98,31	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro.	Jumlah Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro.	200.400.000	199.100.000	100	99,35	
29	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	410.060.000	394.543.747	98,44	96,22	
	Keg. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Peresentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha	410.060.000	394.543.747	98,44	96,22	
	Sub Kegiatan Fasilitas usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran SD M, sertifikasi dan teknologi.	Jumlah fasilitas usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran SD M, sertifikasi dan teknologi	410.060.000	394.543.747	98,44	96,33	
30	Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	158.397.000	126.360.500	84,70	79,77	
	Keg. Penerbitan tanda daftar gudang	Persentase rekomendasi penerbitan tanda daftar	100.000.000	85.247.500	85,63	85,25	

		gudang					
	Sub Kegiatan Fasilitas penerbitan tanda daftar guang	Jumlah rekomendasi penerbitan tanda daftar gudang	100.000.000	85.247.500	85,63	85,25	
31	Kegiatan , Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit Surat keterangan asal)	Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit Surat Keterangan Asal)	58,397.000	41.113.000	83,13	70,40	
	Sub Kegiatan , Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA.	Jumlah Koordinasi pengelolaan pasar internasional	58,397.000	41.113.000	83,13	70,40	
	Program Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	Persentase pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	2.672.756.902	2.645.688.902	100	99,89	
32	Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana distribusi perdagangan	Persentase pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	2.672.756.902	2.645.688.902	100	99,89	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan.	Jumlah pasar yang dibangun dan jumlah pemeliharaan bangunan pasar	2.672.756.902	2.645.688.902	100	99,89	
	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pembangunan sarana distribusi perdagangan	2.171.075.000	2.110.962.738	99,23	97,23	
33	Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana distribusi perdagangan	Persentase pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.091.075.000	2.030.962.738	99,20	97,13	
	Sub Kegiatan Penyediaan distribusi perdagangan	Jumlah penyediaan sarana distribusi perdagangan	1.824.100.000	1.788.146.757	100	98,03	
	Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan Sarana distribusi perdagangan.	Jumlah pemeliharaan saluran air, jumlah bersih, taman, pengawasan kebersihan pasar dan tim kebersihan adipura	266.975.000	242.815.971	93,75	90,95	
34	Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.	Persentase Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	80.000.000,-	80.000.000	100	100	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan pengendalian pengelolaan Sarana distribusi perdagangan.	Jumlah penataan/penerbitan tempat usaha pedagang	80.000.000,-	80.000.000	100	100	
35	Program Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting .	Persentase stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	323.824.200	177.151.800	92,50	54,71	
	Kegiatan Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kabupaten/kota	Persentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kabupaten/kota	323.824.200	177.151.800	92,50	54,71	

	Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan.	Jumlah informasi dan data kebutuhan harga bahan pokok penting pasar rakyat	323.824.200	177.151.800	92,50	54,71	
	Program Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen dan barang/jasa yang beredar	379.184.900	294.099.867	81,37	77,56	
36	Kegiatan Pelaksanaan metrology legal, berupa tera ulang dan pengawasan	Persentase Pelaksanaan Metrology Legal berupa, Tera Ulang, dan Pengawasan	379.184.900	294.099.867	81,37	77,56	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang.	Jumlah pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang	228.682.500	155.246.646	72,00	67,89	
	Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan metrology legal	Jumlah pengawasan/ penyuluhan metrology legal	85.000.000	83.000.000	100	97,65	
	Sub Kegiatan Penyidikan metrology legal	Jumlah penyidikan/ penyuluhan metrology legal	65.502.400	55.853.221	89,90	85,27	
37	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	50.000.000	44.826.000	90,00	89,65	
	Kegiatan pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan perdagangan	Kegiatan pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan perdagangan	50.000.000	44.826.000	90,00	89,65	
	Sub kegiatan Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	50.000.000	44.826.000	90,00	89,65	
39	Program Perencanaan dan pembangunan industri.	Persentase Pertumbuhan IKM	2.011.500.000	1.291.719.363	78,73	64,22	
	Kegiatan Penyusunan perencanaan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota.	Jumlah hasil penerapan RP IKM yang ditetapkan jadi perda	2.011.500.000	1.291.719.363	78,73	64,22	
	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumberdaya industri..	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumberdaya industri	120.000.000	119.893.322	100	99,91	
40	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri..	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	1.65.500.000	932.325.547	74,09	56,45	
	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran masyarakat	Jumlah Pembinaan keterampilan pengrajin promosi dan raker	240.000.000	239.500.494	100	99,79	
41	Program pengendalian izin usaha industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait	15.000.000	15.000.000	100	100	
	Kegiatan Penerbitan izin usaha industri (IUI) Ijin perluasan usaha industri (IPUI) ijin usaha kawasan industri (IUKI) dan	Jumlah penerbitan izin usaha industri (IUI) ijin perluasan usaha industri (IPUI) ijin perluasan kawasan	15.000.000	15.000.000	100	100	

	ijin perluasan kawasan industri (IPKI) kewenangan kabupaten/kota berbasis system informasi industri nasional (SIINAS)	industri (IPKI) yang berbasis system informasi industri)					
	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perijinan di bidang industri dalam lingkup IUI<IPUI<IUKI<IPKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota berbasis system informasi industri nasional (SIINAS)	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perijinan di bidang industri dalam lingkup IUI IPUI IUKI IPKI kewenangan kabupaten/kota berbasis system informasi industri nasional (SIINAS)	15.000.000	15.000.000	100	100	
42	Program pengelolaan system informasi industri nasional	Persentase Penyediaan Sistem Informasi Data Industri secara lengkap dan terkini	88.000.000	85,872.100	100	97,58	
43	Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUT, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota a.	Persentase Sistem Informasi Data Industri lintas kab/kota yang mauk dalam sistem nasional secara lengkap	88.000.000	85,872.100	100	97,58	
	Sub Kegiatan Fasilitas pengumpulan pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melaluisite informasi industri nasional (SIINAS).	Jumlah dokumen fasilitasi pengumpulan pengolahan data dan analisis data industri data kawasan industri serta data lain lingkup kab/kota system informasi industri nasional SIINAS	88.000.000	85,872.100	100	97,58	

2.7. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun anggaran sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022 terhadap LPPD 2021	Tindak lanjut
	Tidak ada tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun 2021	

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Tugas Desentralisasi dan Pembantuan yang merupakan system dan cerminan prosedur penugasan pemerintah kepada Daerah dan Desa serta penugasan daerah (provinsi atau kabupaten/kota) kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia serta melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada pemberi tugas. Pemberian tugas dana alokasi khusus dimaksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum.

Dana alokasi khusus/DAK yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota biasanya bersumber dari APBN Kementerian. Pada tahun 2022 di Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan Kota baru menerima anggaran pembiayaan Non Fisik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI.

a. Tugas Pembantuan Pusat/Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

i. Target Kinerja

Program dan Kegiatan melalui Dana Alokasi Khusus/DAK diterima dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Melalui Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan Kab. Kotabaru Tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Program dan kegiatan yang diterima oleh
Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dana Alokasi Khusus/DAK Non
Fisik Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan yang dilaksanakan	Instansi Pembe- ri Tugas	Jumlah Ang- garan (Rp)
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi		200.400.000.-
	Kegiatan Pendidikan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kab/kota Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia	
2	Program Pemberdayaan Usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro Kegiatan Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemandirian, perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro	Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia	200.400.000.-

ii. Realisasi

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru pada Tahun 2022 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus / DAK yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp. Rp.

400.400.000.-dengan realisasi Rp.Rp 398.380.000,- atau 90.00%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.1.2

Realisasi Program dan Kegiatan melalui Dana Alokasi Khusus/DAK Fisik dan Non Fisik Tahun 2022

No	bidang Urusan	Peraturan pelaksanaan	Program kegiatan output rincian kegiatan	Kab/Kota	KPD pelaksana	okasi anggaran	realisasi anggaran	%	realisasi capaian kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bidang Koperasi	Kementerian Koperasi dan UKM	<p>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi</p> <p>Kegiatan Pendidikan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi</p>	Kotabaru	Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan	200.400.000	197.960.000	98,78	Para pengurus koperasi meningkatkan kemampuan pengetahuan tentang perkoperasian	100	
2	Bidang Usaha mikro	Kementerian Koperasi dan UKM	<p>Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro</p> <p>Kegiatan Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemandirian, peningkatan kapasitas, pemberdayaan kelompok, pembinaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan</p> <p>Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman</p>	Kotabaru	Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan	200.400.000	200.400.000	100	Para wirausaha antara lain pemasaran produk usahanya melalui online	100	

			dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro								
						400.400.000	398.360.000	99,39		100	

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/kota

3.2.1. Target Kinerja

- Tidak ada

3.2.2. Realisasi

- Tidak ada

3.3 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan melalui dana alokasi khusus/DAK non fisik tidak ada permasalahan yang berarti.

Kendala :

- a. SDM yang belum merata yang memiliki sertifikasi/diklat manajemen administrasi dan keuangan bagi pengurus maupun pengawas koperasi.
- b. Belum terampilnya dalam penggunaan media sosial sebagai media pemasaran produkolahan secara online.

1.4 Saran dan Tidak Lanjut

➤ **Saran**

Pengurus dan pengawas perlu memiliki sertifikasi keahlian dalam pengelolaan keuangan maupun administrasi lainnya sebelum berdirinya koperasi..

Para wirausaha dalam pemasaran produkolahan sebaiknya mempunyai desain baik iturasanya juga kemasannya dan dapat menggunakan melalui media social secara online.

➤ **Tindak lanjut**

Untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan baik pengurus maupun wirausaha harus dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkenaan dengan manajemen keuangan dan pemasaran produkolahan baik secara manual maupun online.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Yang dilaksanakan

4.1.1. Jenis pelayanan Dasar

- Tidak ada

4.1.2. Target pencapaian SPM

- Tidak ada

4.1.3. Realisasi

- Tidak ada

4.1.4. Alokasi Anggaran

- Tidak ada

4.1.5. Dokumen Personil

- Tidak ada

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

- Tidak ada

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan tersusunnya Laporan ini diharapkan akan mendapat masukan yang berguna bagi perbaikan Kinerja dan Perkembangan di masa – masa yang akan datang ke arah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat dan semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa member bimbingan dan petunjuk serta kekuatan kepada kita semua dalam melanjutkan pembangunan bangsa.

Kotabaru, 20 Januari 2022

Kepala Dinas,

Ir. H. Hardhani, M.Si

Nip.19650401 199308 1001

Pembina Utama Muda IV/c